

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi adalah kesempatan daerah untuk menjalankan otonomi. Otonomi daerah sebagai bentuk kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya. Secara garis besar otonomi daerah yaitu diberikannya wewenang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya (Murniati & Kasasih, 2017). Pembangunan daerah dilakukan agar daerah dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki. Peran pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan serta kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam memaksimalkan potensi yang ada. Setiap daerah diharapkan mampu memiliki inovasi serta kemandirian dalam menggali dan mengelola potensi di daerahnya (Christia & Ispriyarso, 2019)

Untuk membiayai berjalannya pemerintahan daerah diperlukan sumber pembiayaan yang memadai. PAD merupakan sumber pembiayaan untuk membiayai dan menunjang pembangunan daerah. Pemerintah daerah sudah semestinya memaksimalkan penyerapan PAD. Pendapatan asli daerah dapat dipakai dalam mengetahui berhasil atau tidaknya otonomi daerah (Rosa et al., 2020). Pemerintah daerah memiliki peran sangat besar untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Asli (PAD). Semakin tinggi pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berpengaruh dalam kemandirian daerah dalam mendanai kebutuhannya. Suatu daerah dapat dikatakan maju dalam hal ekonomi ketika pendapatan asli daerahnya tinggi dan sebaliknya. Sehingga, pemerintah daerah harus meningkatkan PAD dari sumber yang ada (Humairah et al., 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah (PERDA). PAD diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Asdar, 2019)

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu upaya peningkatan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta melakukan peningkatan efektifitas pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan potensi yang ada serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Retribusi daerah dapat dijadikan salah satu parameter dalam mengetahui tingkat kemampuan pendanaan daerah. Apabila retribusi tinggi maka kontribusinya terhadap PAD akan semakin tinggi juga. Selain sebagai sumber penerimaan daerah, retribusi daerah juga memiliki kontribusi dalam mendanai pemerintahan daerah. Sebagai salah satu penunjang pendanaan pemerintahan, retribusi daerah harus digali dan dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Adapun upaya dalam mengoptimalkan kemandirian pendanaan daerah dapat dilakukan dengan memaksimalkan penyerapan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah (Elpiani et al., 2023)

Efektivitas retribusi daerah merupakan penilaian terhadap realisasi retribusi daerah selama satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah retribusi daerah

sudah efektif atau tidak, dapat diketahui melalui perbandingan antara realisasi dengan target retribusi. Kontribusi retribusi daerah dapat dinilai dengan melihat perbandingan penerimaan retribusi dengan total PAD selama satu periode. Salah satu cara untuk memaksimalkan retribusi daerah yaitu meningkatkan efektivitas retribusinya dengan cara meningkatkan pengelolaan retribusi dan menggali sumber atau potensi retribusi yang baru (Silaningsih & Utami, 2018)

Data yang diperoleh di BPS kota padang, Kota padang adalah kota yang memiliki wilayah paling luas serta penduduk dengan jumlah terbanyak di Pulau sumatera. Hal ini memiliki pengaruh terhadap besarnya potensi penerimaan retribusi daerah di Kota Padang. Potensi yang besar ini harus dimaksimalkan oleh pemerintah Kota padang agar dapat digali dan dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Semakin baik pengelolaan dan penyerapan retribusi daerah maka semakin maksimal kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Pengelolaan retribusi daerah selain harus dimaksimalkan juga harus dikelola dengan seefektif mungkin, dalam artian target retribusi daerah harus mencapai target yang sudah ditetapkan. Retribusi berperan dalam peningkatan PAD, jika retribusi daerah dimaksimalkan, pendapatan yang diterima daerah akan semakin besar (Amalia, 2019).

Berikut merupakan data target dan realisasi Retribusi Daerah Kota Padang pada 2019 - 2023:

Tabel 1. 1 Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019-2023

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019-2023			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2019	95,876,680,357.00	48,243,550,480.00	50.32%
2020	66,192,533,286.00	37,174,849,443.00	56.16%
2021	69,307,060,256.00	43,513,638,900.00	62.78%
2022	52,911,290,667.00	41,262,274,570.00	77.98%
2023	45,136,239,956.00	48,690,194,076.00	107.87%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas terlihat realisasi pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 95.876.680.357,00 akan tetapi yang terealisasi sebesar 48.243.550.480,00 dengan kata lain capaian retribusi daerah tahun 2019 hanya 50,32% Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 66.192.533.286,00 dan terealisasi sebesar 37.174.849.443,00 capaian retribusi daerah sebesar 56,16%. Pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 69.307.060.256,00 yang terealisasi sebesar 43.513.638.900,00 capaian retribusi daerah tahun 2021 sebesar 62,78%. Lalu pada tahun 2022 target sebesar 52.911.290.667,00 yang terealisasi sebesar 41.262.274.570,00 capaian retribusi daerah tahun 2022 sebesar 77,98%, dan terakhir pada tahun 2023 realisasi retribusi daerah mencapai 48.690.194.076,69 targetnya 45.136.239.956,00 capaiannya 107,87%. Dilihat dari data diatas maka bisa dikatakan uang yang terealisasi untuk retribusi daerah berjalan dengan lancar.

Besarnya penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa besar upaya dalam memungut retribusi daerah. Realisasi target retribusi daerah dapat digunakan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan daerah. Untuk mencapai target yang sudah ditetapkan diperlukan kinerja yang optimal dalam mengelola dan menggali retribusi daerah (Romiyati et al., 2019). Menurut Undang - Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dengan kata lain Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah. untuk kepentingan pribadi atau badan. Dengan kata lain pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah.

Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang sebenarnya. Otonomi daerah bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah (Kobandaha & Wokas, 2016).

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi wisata berupa pemandangan pantai yang sangat indah dan taman - taman yang sejuk dan cukup potensial jika dikelola dan dikembangkan dengan baik. Selain itu Kota Padang juga merupakan pusat pemerintahan, pembangunan dan pendidikan

di Sumatera Barat, sehingga ini akan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan di beberapa sektor, misalnya sektor pariwisata, sektor perdagangan dan sektor penyediaan jasa, yang tidak dikembangkan dengan baik akan mejadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial melalui penerimaan retribusi daerah.

Besarnya penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa besar upaya dalam memungut retribusi daerah. Realisasi target retribusi daerah dapat digunakan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan daerah. Untuk mencapai target yang sudah ditetapkan diperlukan kinerja yang optimal dalam mengelola dan menggali retribusi daerah (Romiyati et al., 2019)

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga sebagai bentuk upaya meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah dari sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan untuk melakukan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang beragam yang dimiliki masing-masing Pemerintah Daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional dan dalam melakukan pembangunan diperlukan dana untuk merealisasikannya. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat aturan dalam mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa “Retribusi Daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang penting guna membiayai

pelaksanaan daerah dan pembangunan daerah buat menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, serta bertanggung jawab”. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah wajib memaksimalkan sumber-sumber penerimaan keuangan lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama Retribusi Daerah. Perlu dilihat tingkat efektivitas dari penerimaan Retribusi Daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Silaningsih & Utami, 2018)

Efektivitas Retribusi Daerah sendiri adalah penilaian kinerja pemungutan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran, apakah telah efektif atau belum dapat dilihat dari persentase penerimaan Retribusi Daerah yang terealisasi dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan, dan tercapainya efektivitas Retribusi Daerah apabila pencapaiannya melebihi target yang hendak dicapai (Octovido, 2014). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan Retribusi Daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pemasukan baru yang potensinya memungkinkan sehingga bisa dipungut retribusinya

Oleh karena itu berdasarkan teori dan data realisasi anggaran pada tahun 2019-2023 diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis serta solusi dari belum tercapainya target retribusi daerah kota padang. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan berjudul **“ANALISIS EFEKTIVITAS REALISASI RETRIBUSI DAERAH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas realisasi retribusi daerah kota padang?
2. Bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota padang?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas realisasi retribusi daerah kota padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota padang

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang akan diterima penulis dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Diharapkan dapat berguna sebagai referensi serta menambah wawasan tentang efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam melaksanakan penelitian tentang Analisis efektivitas realisasi retribusi daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota padang kak

c. Agar mampu menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

2. Bagi BPKAD Kota Padang

Dapat dijadikan masukan dalam upaya memaksimalkan pengelolaan dan penerimaan retribusi daerah.

3. Bagi Universitas Dharma Andalas

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa dalam mengetahui efektivitas realisasi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota padang.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya apabila ingin membuat penelitian sejenis.

1.5 Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan serta dapat diuji kebenarannya, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan kunjungan dan tanya jawab langsung kepada pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data atau informasi yang bersifat eksternal dan kepada Bidang Divisi Akuntansi untuk memberikan data atau informasi yang bersifat internal.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, yang diidentifikasi dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis dari objek tugas akhir. Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi) yang mana data tersebut yaitu Laporan Target dan Realisasi Retribusi Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan laporan tugas akhir yang telah ditulis oleh penulis adalah:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan dibahas pada tugas akhir, perumusan masalah yang digunakan untuk memberitahukan permasalahan pada objek yang diteliti. Tujuan tugas akhir merupakan tujuan dari penelitian dalam pemecahan masalah yang ada pada objek penelitian. Manfaat tugas akhir berisikan mengenai pencapaian yang diterima perusahaan dari tujuan yang ada pada tujuan tugas akhir. Sistematika tugas akhir merupakan bagian akhir pada bab pertama dari tugas akhir.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membuat pemaparan teori – teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah. Teori tersebut diantaranya mengenai

efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Bab III Gambaran Umum Instansi Dan Pembahasan

Bab ini membuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan oleh penulis.

Bab IV Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan dari hasil pembahasan tugas akhir.

Daftar pustaka

Daftar pustaka adalah rangkaian daftar tulisan yang berisikan berbagai sumber referensi yang berasal dari buku, jurnal, makalah, website pencarian, hingga artikel yang disajikan sebagai landasan landasan dari sebuah karya tulis.

Lampiran

adalah dokumen tambahan yang disisipkan atau ditambahkan pada dokumen utama.